

**PENGUATAN LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH
DALAM SISTEM PERBANKAN NASIONAL**

DISERTASI



Oleh:

**ULYA ATSANI
1031201001**

Komisi Promotor:

1. Prof. Dr. Yaswirman, MA (Promotor)
2. Dr. Busyra Azheri, SH, M.H. (Co. Promotor)
3. Dr. Azmi Fendri, SB, M.Kn. (Co Promotor)

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

ABSTRACT

**Empowering Islamic Bank Institution
in Indonesian National Banking System**
By Ulya Atsani (1031201001)

In reality, the development of Islamic Bank in Indonesia had not yet followed the competitive development both national and/or global scale. This might happen because of law factor as a foundation of the Islamic Bank development. Considering this phenomenon, a study of political law in related with the construction Islamic Bank and purification Islamic Bank Institution in national banking system was highlyly urgent to determine the construction of Islamic Banking Institution as its target in the future. This desertation was aimed to know of how to regulate Islamic Bank in National Law System and how to purify Islamic Banking Institution in National Banking System in order to determine the strengthening target of Islamic Bank in National Banking System. The design of this desertation was normative law research. To support the main data, the empiric data were used to analyze it. After doing the research, it could be concluded that the development of Islamic Bank regulation in National Right showed that the government was accomodative with bank which adapted Islamic values because this aspect is considered as irrelevant thing with the constructed aim of Islamic Nation as well as political rights in order to repromote 'Piagam Jakarta.' This desertation opposed Daniel E. Price invention who said that the transformation process of Islamic values into national rights and societies relationship was urgent to welcome Islamic Nation. The purification of the Islamic Banking Institution through spin off Islamic Service Institution, the Strengtheness of Supervice Institution, and the Overcoming of some problems happened in this kind of bank had not yet been solved, but there must be political arguments. This could strengthen constitutional moderate group paradigm where the transformation of Islamic Law into National Law had to consider national and religion relevancy. Therefore, the strengtheness of Islamic Bank Institution could be done through the construction of trully Islamic Bank, merger, the construction of Islamic Service Institution under professional and independent Islamic principles, even the construction of special courts under Religion Court responsibilities. This construction was based on the application of these principles could be run altogether. In other words, as long as this Institution adobted the Islamic principles, so Islamic value could also be done as well.

Keywords: Empowering, Islamic Bank Institution, National Banking System

ABSTRAK

Penguatan Lembaga Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional

Oleh: Ulya Atsani (1031201001)

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam realitanya belum diiringi oleh peningkatan daya saingnya, baik dalam skala nasional maupun global. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari faktor hukum sebagai landasan pengembangannya. Penguatan hukum perbankan syariah dihadapkan kepada perdebatan relasi negara dan agama (hukum Islam). Untuk itu, kajian terhadap politik hukum pengaturan perbankan syariah dan purifikasi lembaga perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional memiliki urgensi yang bernilai tinggi dalam menentukan arah penguatan lembaga perbankan syariah di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perbankan syariah dalam sistem hukum nasional, bagaimana purifikasi lembaga perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional, sehingga dapat ditentukan bagaimana arah penguatan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Namun untuk mempertajam analisis didukung oleh data empiris. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa perkembangan pengaturan perbankan syariah dalam pemndang-undangan nasional memperlihatkan bahwa negara semakin akomodif terhadap syariat Islam dalam bidang perbankan karena aspek ini dipandang tidak berhubungan dengan tujuan pembentukan negara Islam sebagaimana halnya perundang-undangan di bidang politik/ usaha menghidupkan kembali Piagam Jakarta Kajian ini membantah temuan Daniel E. Price yang menyatakan bahwa proses transformasi syariat Islam kedalam perundang-undangan negara dan dalam kehidupan sosial masyarakat dianggap penting menuju negara Islam. Pemurnian/purifikasi lembaga perbankan syariah melalui *spin-off* Unit Usaha Syariah, penguatan lembaga pengawasan syariah dan lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan belum secara utuh, namun terdapat kompromi-kompromi politik. Hal ini memperkuat paradigma kelompok moderat-konstitusional bahwa transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional harus memperhatikan keseimbangan negara dan agama. Untuk itu, penguatan lembaga perbankan syariah dilakukan melalui pembentukan bank syariah yang murni syariah, *merger*, pembentukan lembaga pengawasan prinsip syariah yang profesional dan independen, penguatan DPS, serta pembentukan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama. Adapun pembentukan tersebut didasari untuk pelaksanaan prinsip syariah secara utuh. Dengan perkataan lain, sepanjang menyangkut kelembagaan yang didasari kepada prinsip syariah, maka syariat Islam perlu dijalankan secara utuh.

Kata Kunci. Penguatan, Lembaga Perbankan Syariah, Sistem Perbankan Nasional